

**ANALISIS FISKAL DAERAH, BELANJA DAERAH  
DAN KINERJA EKONOMI: STUDI KASUS  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Sutrisno  
NIM 105020115111004**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2013**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

### **ANALISIS FISKAL DAERAH, BELANJA DAERAH DAN KINERJA EKONOMI: STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI JAWATENGAH**

Yang disusun oleh :

Nama : Sutrisno  
NIM : 105020115111004  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Juli 2013.

Malang, 15 Juli 2013

Dosen Pembimbing,

**Dr. Susilo, SE, MS.**

NIP. 19601030 198601 1 001.

# ANALISIS FISKAL DAERAH, BELANJA DAERAH DAN KINERJA EKONOMI: STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

**Sutrisno**

**Susilo**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: caesarbontos@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This study analyzes the role of local government in economic performance in Central Java Province. The role of government in the economy can be seen from the analysis of the local fiscal impact on economic performing, and local government spending on economic performance in the districts/towns in Central Java province. By using Partial Least Square analysis (PLS) was concluded that the source of local fiscal has positive influence on local government spending significant, local government spending has significant effect on economic performance as measured by statistics.*

*Keywords: Region Fiscal Source, Expenditures, Economic Performance, Partial Least Square.*

## **ABSTRAK**

*Kajian ini menganalisis peranan pemerintah daerah dalam kinerja perekonomian daerah di Jawa Tengah. Peranan pemerintah dalam perekonomian dapat dilihat dari analisis pengaruh fiskal daerah, belanja daerah terhadap kinerja ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan analisis Partial Least Square (PLS) didapatkan kesimpulan bahwa sumber fiskal daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah secara signifikan, dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang diukur secara statistik.*

*Kata kunci: Sumber Fiskal Daerah, Belanja Daerah, Kinerja Ekonomi, Partial Least Square.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah diberlakukan lebih dari satu dasawarsa yaitu sejak Januari 2001, dengan kebijakan ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan pendelegasian tugas pelayanan ini diikuti oleh pendelegasian kewenangan keuangan (*money follow function*). Oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk menyusun anggaran daerah masing-masing.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi yang sangat penting dalam upaya pengembangan kemampuan, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Anggaran daerah disusun dengan memperhitungkan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, Anggaran daerah dapat pula digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja (anggaran berbasis kinerja), Anggaran daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pada akhirnya taraf kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Anggaran daerah ini sangat bergantung terhadap sumber-sumber fiskal yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Namun sampai dengan saat ini peranan pemerintah pusat masih sangat

besar dalam menyokong anggaran daerah. Tujuan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin terpenuhinya standar pelayanan publik.

Kemandirian fiskal menjadi isu yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan pendapatan asli daerah (PAD) sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan pada anggaran daerah (APBD). Prinsipnya, semakin besar proporsi pendapatan asli daerah (PAD) kepada total penerimaan pada anggaran daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Berdasarkan tolok ukur kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Total pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah walaupun dari tahun 2008 sebesar 5,326,523 terus meningkat hingga tahun 2012 sebesar 9.659.020, namun presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih kecil. Presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih kecil Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan 2012 masuk dalam interval 10,00% - 20,00% yang dikategorikan mempunyai kemampuan keuangan daerah yang kurang.

Dengan kondisi sumber fiskal yang dimiliki tiap-tiap kabupaten/kota, pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber fiskal tersebut ke dalam alokasi belanja daerah untuk membiayai fungsi pemerintah, termasuk fungsi pemerintah dalam perekonomian. Fungsi dan peranan pemerintah dalam perekonomian dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja ekonomi.

Dengan melihat beberapa hasil penelitian terdahulu yang menganalisis hubungan fiskal daerah, belanja daerah dan kinerja ekonomi yang berbeda-beda tiap-tiap daerah, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh sumber fiskal daerah, belanja daerah dan kinerja ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Otonomi daerah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 5. “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewenangan serta kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan aturan sendiri berdasarkan perundangundangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

### Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek iskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Menurut Sidik dalam Badrudin (2012: 39) desentralisasi adalah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, utamanya memberikan layanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan belanja, kewenangan untuk memungut pajak dan lain sebagainya.

Menurut Asshiddiqie (2006: 28), secara umum pengertian desentralisasi dibedakan menjadi 3 pengertian, yaitu:

1. Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi;
2. Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan;
3. Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan

Secara umum desentralisasi konsep desentralisasi terdiri atas: Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*); Desentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*); Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*); dan Desentralisasi Ekonomi (*Economic or Market Decentralization*) (Sidik, 2002).

### **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah.

Hal utama yang menjadi bahasan sehubungan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah yakni kebutuhan fiskal (*fiskal needs*) dan kapasitas fiskal (*fiskal capacity*) yang keduanya dapat dikaitkan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal disebut fiskal gap. Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*) merupakan suatu komponen yang masuk dalam formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), dimana pengalokasiannya didasarkan formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*) dengan Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*). Besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar Celah Fiskal dan Alokasi Dasar.

### **Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005). Yang dimaksud dengan "urusan wajib" adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Belanja daerah seyogyanya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang dapat diwujudkan dengan pencapaian standar pelayanan minimum. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

Belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan dan struktur organisasi pemerintahan daerah.

### **Hubungan Fiskal Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Anggaran belanja daerah merupakan salah satu alat kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai fungsi tersebut. Sumber-sumber pendanaan anggaran daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah.

Dalam penganggaran belanja tersebut pemerintah (eksekutif) melakukan pembahasan anggaran bersama dewan wakil rakyat (legislatif) membahas program-program yang akan dibiayai dan hal utama yang mendasari pembahasan ini adalah masalah keterbatasan anggaran (*budget constraint*). Proses pemilihan program-program yang akan dibiayai oleh pemerintah inilah yang disebut dengan proses pilihan publik. Pemerintah daerah dengan sumber fiskal yang lebih besar akan mempunyai batas anggaran yang lebih longgar sehingga akan lebih mudah untuk mengalokasikan anggaran untuk belanja daerahnya dibanding dengan pemerintah daerah yang mempunyai keterbatasan anggaran yang ketat.

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sidik, 2002).

### **Hubungan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi**

Didalam sistem perekonomian, pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi. Hal ini dikarenakan sistem pasar tidak dapat melaksanakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien. Hal ini pulalah yang menyebabkan terjadinya kegagalan di pasar. Kegagalan pasar ini terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Adanya kegagalan pasar inilah yang memicu peran aktif pemerintah dalam perekonomian, salah satunya adalah dengan penyediaan barang publik yang dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Penyediaan barang-barang publik yang dapat dilakukan pemerintah seperti misalnya pertahanan nasional, jalan raya (infrastruktur), pendidikan, kesehatan, kehakiman, pekerjaan umum dan sebagainya.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah dalam perekonomian adalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar sekaligus komponen input fungsi produksi. Sehingga pendidikan dan kesehatan mempunyai peran ganda sebagai input dan output pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Pendidikan menempati posisi yang sentral dalam membentuk kemampuan negara-negara yang berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2006: h. 434).

Investasi pendidikan dan kesehatan menyatu dalam pendekatan modal manusia (human capital). Pendidikan merupakan aset moral dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan serta merupakan bentuk investasi non fisik yang sering disebut dengan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh ekonom untuk pendidikan, kesehatan dan kapasitas manusia yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal ini ditingkatkan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal pokok untuk mencapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas, yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro dan Smith, 2006: h. 441).

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu tertarik untuk melakukan studi dengan bermacam-macam tujuan. Beberapa peneliti terdahulu banyak mengamati hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Lin dan Liu (2000) dalam jurnalnya yang berjudul *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*, meneliti hubungan dan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan adanya efisiensi ekonomi yang meningkat. Penelitian lain oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Pengaruh PAD, DAK, DAU, Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran, menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran, menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.

Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, Khusaini dan Prasetya (2004) dalam jurnalnya yang berjudul Kinerja Pemerintah Daerah di Era Desentralisasi Fiskal : Analisis Dampak Anggaran Daerah Terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Malang, meneliti untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal melalui anggaran daerah terhadap pengembangan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Khusaini dan Prasetya (2004) mengindikasikan bahwa penyebab hal tersebut adalah struktur APBD untuk pengeluaran pemerintah masih didominasi oleh pengeluaran rutin, yang sebagian besar dialokasikan pada belanja pegawai.

### **C. METODE PENELITIAN**

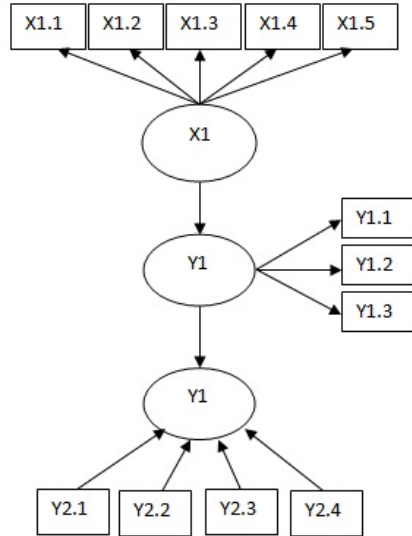
Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, dimana suatu permasalahan dicoba untuk dipecahkan melalui tahapan pengumpulan dan penyusunan data-data yang kemudian akan diolah,

dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan agar pihak lain dapat memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik).

Ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti bagaimana pengaruh antara fiskal daerah terhadap belanja daerah dan pengaruh belanja daerah terhadap kinerja ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah sampai akhir tahun 2012 adalah 35 pemerintah kabupaten/kota dengan rincian, 29 kabupaten dan 6 kota. Periode penelitian ini dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota

Analisis kuantitatif didasarkan pada analisis variabel-variabel yang dapat dijelaskan secara terukur dengan menggunakan alat analisis *Partial Least Square* (PLS). dengan model struktural:

**Gambar 1. Kontruksi Diagram Jalur.**



Sumber: diolah

Dimana X1 merupakan variabel laten sumber fiskal daerah yang dibentuk dari: X1.1, adalah pendapatan asli daerah, X1.2 adalah dana alokasi umum, X1.3 adalah dana alokasi khusus, X1.4 adalah dana bagi hasil, X1.5 adalah penerimaan lain-lain yang sah. Y1 merupakan variabel laten belanja daerah yang dibentuk oleh: Y1.1 adalah belanja yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, Y1.2 adalah belanja yang dialokasikan untuk fungsi kesehatan, Y1.3 adalah belanja yang dialokasikan untuk fungsi ekonomi. Y2 merupakan variabel laten yang dibentuk oleh: Y2.1 adalah laju pertumbuhan ekonomi, Y2.2 adalah ratio perbandingan PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi, Y2.3 adalah PDRB per kapita, Y2.4 adalah Angka kemiskinan

#### D. HASIL PEMBAHASAN

##### Pengujian *Goodness of Fit Model Pengukuran (Outer Model)*

###### a. *Convergent Validity*

*Convergent validity* atau yang bisa disebut dengan loading factor dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Pengujian *convergent validity* melihat nilai *loading factor* apakah diatas 0,50 atau tidak.

Tabel 1: Hasil Pengujian *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	Nilai <i>Loading Factor</i>	Keterangan
Sumber Fiskal Daerah (X1)			
	Pendapatan Asli Daerah (X1.1)	0.859	Valid
	Dana Alokasi Umum (X1.2)	0.697	Valid
	Dana Bagi Hasil (X1.4)	0.839	Valid
	Pendapatan lain-lain (X1.5)	0.735	Valid
Belanja Daerah			
	Belanja Pendidikan (Y1.1)	0.810	Valid
	Belanja Kesehatan (Y1.2)	0.854	Valid
	Belanja Ekonomi (Y1.3)	0.861	Valid

Sumber: Hasil estimasi SmartPLS (diolah)

Berdasarkan uji *convergent validity* tahap pertama indikator dana alokasi khusus (X1.3) tidak valid maka, indikator tersebut dihilangkan dari model. Kemudian diestimasi lagi model tersebut didapatkan hasil seperti Tabel 1. diatas. Berdasarkan hasil *Convergent Validity* diatas dapat dilihat bahwa semua indikator memenuhi persyaratan validitas *convergent validity*. Seluruh indikator diatas memiliki nilai *loading factor* diatas 0,50 sehingga dapat disimpulkan pengukuran indikator-indikator tersebut telah memenuhi persyaratan validitas konvergen

#### b. *Composite Reliability*

Uji *composite reliability* digunakan untuk mengukur konsistensi internal, dan nilainya harus di atas 0,60. Hasil uji ini terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2 : Hasil Pengujian *Composite Reliability*

Variabel	Nilai <i>Composite Reliability</i>
X1	0,865
Y1	0,879

Sumber: Hasil estimasi SmartPLS (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kedua model reflektif telah memenuhi uji *composite reliability* karena seluruh variabel laten memiliki nilai *composite reliability* yang berada di atas 0,60. Masing-masing nilai *composite reliability* untuk laten sumber fiskal daerah sebesar 0,865 dan belanja daerah sebesar 0,879

#### c. *Discriminant Validity*

Pengujian validitas diskriminan menggunakan nilai akar AVE yang dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten. Hasil pengujian secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.: Hasil Validitas Diskriminan

Variabel	AVE	Akar AVE	Skor Korelasi Antar Variabel Laten		
			X1	Y1	Y2
X1	0,617	0,785			
Y1	0,709	0,843	0,867		

Sumber : Hasil estimasi SmartPLS (diolah)

Model mempunyai *discriminant validity* yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk reflektif lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa akar AVE konstruk Y1 sebesar 0,843 lebih rendah daripada korelasinya dengan konstruk X1 yang sebesar 0,867. Jadi konstruk reflektif yang digunakan pada model ini tidak memenuhi kriteria *discriminant validity*. Penelitian dapat dilanjutkan namun dengan catatan bahwa hubungan antar laten (*inner model*) lebih besar dari pada hubungan laten dengan variabel indikatornya (*outer model*)



### Pengujian Goodness of Fit Model Pengukuran Struktural (*Inner Model*)

Pengujian goodness of fit model struktural pada inner model menggunakan nilai *predictive-relevance* (Q2). Nilai Q2 mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai  $Q2 > 0$  menunjukkan model memiliki *predictive relevance*, sebaliknya jika  $Q2 < 0$  menunjukkan model tidak memiliki *predictive relevance*. Nilai R2 masing-masing variabel endogen dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4: Hasil Perhitungan R2 pada Variabel Endogen

Variabel Endogen	Nilai R2
Sumber Fiskal Daerah (X1)	
Belanja Daerah (Y1)	R12 = 0,752
Kinerja Daerah (Y2)	R22 = 0,369

Sumber: Hasil estimasi SmartPLS (diolah)

Nilai *predictive relevance* diperoleh dengan rumus :

$$Q2 = 1 - (1 - R12) (1 - R22)$$

$$Q2 = 1 - (1 - 0,752) (1 - 0,369)$$

$$Q2 = 1 - (0,248) (0,631)$$

$$Q2 = 0,844$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai *predictive relevance* menunjukkan angka 0,844. Ini mengindikasikan bahwa nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya memiliki *predictive relevance* karena nilai Q2 lebih dari 0 (nol). Dengan kata lain, informasi yang terkandung dalam data 84% dapat dijelaskan oleh model tersebut. Sedangkan sisanya 16% dijelaskan oleh variabel lain (yang tidak terkandung di dalam model) dan *error*. Dengan demikian model struktural yang terbentuk telah sesuai.

### Hasil Pendugaan Model Pengukuran

#### a. *Outer Model* Variabel Sumber Fiskal Daerah

Variabel sumber fiskal daerah diukur dengan indikator yang bersifat reflektif. Hasil outer loading indikator-indikator dari konstruk ini dapat diamati pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 : Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel Sumber Fiskal Daerah

Indikator	Nilai Outer Loading	T-statistik
Pendapatan Asli Daerah (X1.1)	0.859	20.89
Dana Alokasi Umum (X1.2)	0.697	13.25
Dana Bagi Hasil (X1.4)	0.839	15.97
Pendapatan lain-lain (X1.5)	0.735	8.52

Sumber : Hasil estimasi SmartPLS (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, indikator pertama yaitu pendapatan asli daerah memiliki kontribusi terbesar terhadap sumber fiskal daerah. Indikator pendapatan asli daerah (X1.1) memiliki nilai outer loading sebesar 0,859 dan nilai t-statistik senilai 20,89. Karena nilai t-statistik  $> 1.96$ , maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini berpengaruh signifikan dalam merefleksikan variabel sumber fiskal daerah.

Pada indikator kedua yaitu dana alokasi umum memiliki nilai outer loading sebesar 0,697 dengan nilai t-statistik 13,24. Karena nilai t-statistik  $> 1.96$ , maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini signifikan dalam merefleksikan variabel sumber fiskal daerah. Mengingat nilai outer loading yang positif mengindikasikan kontribusi positif indikator dana alokasi umum (X1.2) pada pengukuran variabel efisiensi sumber fiskal daerah.

Pada indikator keempat yaitu dana bagi hasil memiliki kontribusi terhadap sumber fiskal daerah dengan nilai outer loading sebesar 0,839 dengan nilai t-statistik 15,96. Karena nilai t-statistik  $> 1.96$ , maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini signifikan dalam merefleksikan variabel sumber fiskal daerah. Mengingat nilai outer loading yang positif mengindikasikan kontribusi positif indikator dana bagi hasil (X1.4) pada pengukuran variabel efisiensi sumber fiskal daerah.

Pada indikator kelima yaitu pendapatan lain-lain memiliki nilai outer loading sebesar 0,735 dengan nilai t-statistik 8,52. Karena nilai t-statistik > 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini signifikan dalam merefleksikan variabel sumber fiskal daerah. Mengingat nilai outer loading yang positif mengindikasikan kontribusi positif indikator pendapatan lain-lain (X1.5) pada pengukuran variabel efisiensi sumber fiskal daerah.

#### b. *Outer Model* Variabel Belanja Daerah

Variabel Belanja Daerah diukur dengan tiga indikator yang bersifat reflektif. Hasil *outer loading* indikator-indikator dari konstruk ini dapat diamati pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6 : Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel Belanja Daerah

Indikator	Nilai <i>Outer Loading</i>	T-statistik
Belanja Pendidikan (Y1.1)	0.809	20.10
Belanja Kesehatan (Y1.2)	0.855	27.37
Belanja Ekonomi (Y1.3)	0.862	32.35

Sumber : Hasil estimasi SmartPLS (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, indikator pertama yaitu belanja pendidikan (Y1.1) memiliki kontribusi terhadap variabel belanja daerah dengan nilai outer loading sebesar 0,809 dan nilai t-statistik senilai 20,10. Karena nilai t-statistik > 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini signifikan dalam merefleksikan variabel belanja daerah. Mengingat nilai *outer loading* yang positif mengindikasikan kontribusi positif indikator laju pertumbuhan ekonomi (Y1.1) pada pengukuran variabel belanja daerah.

Pada indikator kedua yaitu belanja kesehatan (Y1.2) memiliki nilai outer loading sebesar 0,855 dengan nilai t-statistik 27,37. Karena nilai t-statistik > 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini signifikan dalam merefleksikan variabel belanja daerah. Mengingat nilai outer loading yang positif mengindikasikan kontribusi positif indikator belanja kesehatan (Y1.2) pada pengukuran variabel belanja daerah.

Pada indikator ketiga yaitu tingkat belanja ekonomi memiliki kontribusi terhadap belanja daerah dengan nilai *outer loading* sebesar 0,862 dengan nilai t-statistik 32,35. Karena nilai t-statistik > 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini signifikan dalam merefleksikan variabel belanja daerah. Mengingat nilai outer loading yang positif mengindikasikan kontribusi positif indikator belanja ekonomi (Y1.3) pada pengukuran variabel belanja daerah.

#### c. *Outer Model* Kinerja Ekonomi

Variabel kinerja ekonomi diukur dengan empat indikator yang bersifat formatif. Hasil *outer weight* indikator-indikator dari konstruk ini dapat diamati pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7: Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel Kinerja Ekonomi

Indikator	Nilai Outer Weight	T-statistik
Laju Pertumbuhan Ekonomi (Y2.1)	0.247	1.46
Ratio PDRB Kab/Kota terhadap PRDB Prov. (Y2.2)	0.973	6.09
PDRB per kapita (Y2.3)	0.817	3.79
Angka Kemiskinan (Y2.4)	-0.382	1.21

Sumber : Hasil estimasi SmartPLS (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, indikator pertama yaitu laju pertumbuhan ekonomi terhadap variabel kinerja ekonomi. Indikator indeks pembangunan manusia (Y2.1) memiliki nilai outer loading sebesar 0,247 dan nilai t-statistik senilai 1,46. Karena nilai t-statistik < 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini tidak signifikan dalam merefleksikan variabel kinerja ekonomi. Mengingat nilai outer loading yang positif mengindikasikan kontribusi positif indikator laju pertumbuhan ekonomi (Y1.1) pada pengukuran variabel kinerja ekonomi.

Pada indikator kedua yaitu Ratio PDRB Kab/Kota terhadap PRDB Prov. (Y2.2) memiliki nilai outer loading sebesar 0,973 dengan nilai t-statistik 6,09. Karena nilai t-statistik > 1.96, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini signifikan dalam merefleksikan variabel kinerja ekonomi. Mengingat nilai outer loading yang negatif mengindikasikan kontribusi positif indikator kemiskinan (Y2.2) pada pengukuran variabel kinerja ekonomi.

Pada indikator ketiga yaitu PDRB per kapita. (Y2.3) memiliki nilai outer loading sebesar 0,871 dengan nilai t-statistik 3,79. Karena nilai t-statistik > 1.96, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini signifikan dalam merefleksikan variabel kinerja ekonomi.

Pada indikator keempat yaitu angka kemiskinan. (Y2.4) memiliki nilai outer loading sebesar - 0,382 dengan nilai t-statistik 1,21. Karena nilai t-statistik < 1.96, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ini mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan dalam merefleksikan variabel kinerja ekonomi.

### Hasil Pendugaan Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model menguji hipotesis dalam penelitian yaitu hubungan antar variabel laten. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-statistik pada masing-masing jalur pengaruh langsung secara parsial.

Tabel 8: Hasil Pengujian Hipotesis dalam Inner Model

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Koefisien Jalur	T-Statistik	Keterangan
Sumber Fiskal Daerah (X1)	Belanja Daerah (Y1)	0.867	38.59	Signifikan
Belanja Daerah (Y1)	Kinerja Ekonomi (Y2)	0.608	13.87	Signifikan

Sumber : Hasil estimasi SmartPLS (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 8 diatas, maka dapat dinyatakan hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut :

- Pengaruh sumber fiskal daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil analisis koefisien inner model antara variabel sumber fiskal daerah terhadap belanja daerah di Jawa Tengah diperoleh nilai koefisien inner weights sebesar 0,876. Nilai t-statistik yang sebesar 44,694 (>1,96) mengindikasikan bahwa sumber fiskal daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.
- Pengaruh Belanja Daerah terhadap kinerja ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil analisis koefisien inner model antara belanja daerah terhadap kinerja ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa ternyata variabel belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi di Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien yang positif 0,745 dan t-statistik yang sebesar 17,638 (> 1,96). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja ekonomi di Jawa Tengah.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka akan diuraikan pembahasan terhadap hasil analisis tersebut. Pembahasan dilakukan untuk melihat sejauh mana hubungan kausalitas yang terjadi sebagai pembuktian terhadap hipotesis yang telah disusun sebelumnya dalam penelitian ini. Teori maupun hasil penelitian empirik yang telah didapat dari pengujian sebelumnya akan digunakan dalam melakukan pembahasan hasil penelitian, apakah teori atau hasil empirik tersebut mendukung ataukah bertentangan dengan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini.

#### a. Pengaruh Sumber Fiskal Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber fiskal daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dalam penganggaran belanja daerah ditentukan oleh estimasi atau perkiraan besaran sumber fiskal yang akan diterima, sehingga dalam kata lain besaran alokasi belanja daerah ditentukan oleh besar kecilnya sumber-sumber fiskal yang mungkin diterima oleh

pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan sumber fiskal yang lebih besar akan mempunyai batas anggaran yang lebih longgar sehingga akan lebih mudah untuk mengalokasikan anggaran untuk belanja daerahnya dibanding dengan pemerintah daerah yang mempunyai keterbatasan anggaran yang ketat

Hasil penelitian ini sependapat dengan Nugraeni (2011) yang dituliskan dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. Hasil penelitiannya yang menyebutkan hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja Daerah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah tahun berjalan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja Daerah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang signifikan dalam memprediksi anggaran belanja daerah.

#### **b. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Ekonomi**

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan langsung yang signifikan antara belanja daerah terhadap kinerja ekonomi, yang pengaruhnya positif. Belanja daerah yang dijabarkan dalam belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja fungsi ekonomi secara langsung dapat mempengaruhi pergerakan kinerja ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya pemanfaatan dana belanja yang optimal dan efisien. Selain itu, juga disebabkan karena belanja daerah mampu menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya. Sebagai contoh, belanja pendidikan yang diproyeksikan untuk menyelenggarakan urusan pendidikan, mempunyai output berupa gedung sekolah. Penyediaan gedung sekolah yang tersebar di seluruh daerah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif karena terdapat sekolah yang dekat dengan daerah permukiman tempat masyarakat tinggal. Dengan adanya kondisi ini, diharapkan dapat memberikan outcome yang baik. Peningkatan tingkat pendidikan dapat meningkatkan kualitas tingkat pekerjaan yang memberikan efek kepada peningkatan tingkat penghasilan yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kinerja ekonomi.

Dalam belanja kesehatan, sebagai contoh dapat berwujud dalam memberikan output berupa rumah sakit atau puskesmas serta pelayanan kesehatan gratis maupun biaya pengobatan murah bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Perbaikan tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkatkan produktifitas dalam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat juga dapat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk melakukan konsumsi untuk kebutuhan lain, karena kebutuhan dasar kesehatan telah dipenuhi melalui layanan kesehatan dari pemerintah. Masyarakat dapat menempatkan anggaran konsumsinya untuk kebutuhan lain yang bersifat produktif sehingga secara keseluruhan dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kinerja ekonomi.

Dalam belanja ekonomi, belanja daerah digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan atau sarana transportasi lainnya yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Kondisi jalan yang baik menjadi sarana penting, disamping ketersediaan angkutan sebagai sarana utama transportasi. Hal ini sangat mendukung dalam proses distribusi. Dengan lancarnya proses distribusi barang dari produsen kepada konsumen maka konsumsi masyarakat juga berjalan lancar, serta tidak terjadi kelangkaan barang yang dapat memicu gejolak ekonomi.

Memperhatikan kondisi tersebut diatas, pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pembangunan dapat mengambil kebijakan, diantaranya dengan memanfaatkan anggarannya secara cermat, efektif dan efisien sehingga tujuan pembangunan dapat direalisasikan. Para penyelenggara pembangunan harus berupaya untuk menghindari adanya kebocoran dana yang digunakan dalam belanja. Sebab, hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri atau tujuan yang tidak tepat sasaran.

Belanja yang efisien dan efektif diharapkan mampu memberikan output dan outcome yang berkualitas. Maka dari itu, besarnya alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan program-program pemerintah maupun kegiatan yang dapat menunjang terciptanya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan fasilitas transportasi maupun komunikasi yang memadai dapat menjadi pendukung dalam lancarnya kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi dan

distribusi) yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan program di bidang pendidikan maupun kesehatan yang berkesinambungan sebagai implementasi dari pengelolaan keuangan yang efektif dapat menjadi pendukung terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kompeten yang berperan dalam kegiatan perekonomian sehingga pergerakan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.

Hasil penelitian ini sependapat dengan Alexiou (2009) yang dituliskan dalam jurnalnya yang berjudul *Government Spending and Economic Growth: Economic Evidence from the South Eastern Europe*. Hasil penelitiannya yang menyebutkan hubungan antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, bahwa belanja pemerintah yang dapat diwujudkan dalam bentuk investasi daerah, penyertaan modal pemerintah serta bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mempunyai pengaruh yang signifikan. Besarnya alokasi dana belanja untuk belanja daerah mampu memacu meningkatnya kinerja ekonomi.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber fiskal daerah ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengaruh positif dapat dirasakan ketika terdapat perubahan jumlah sumber fiskal daerah yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah diikuti dengan kecenderungan peningkatan alokasi belanja daerah. Maka dari itu, hasil ini menguatkan hipotesis yang menyatakan bahwa sumber fiskal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
2. Belanja daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja ekonomi. Pengaruh ini dapat terlihat secara signifikan. Peningkatan alokasi belanja daerah cenderung untuk akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah, sehingga, dapat dikatakan meningkatnya belanja daerah akan memberikan indikasi pengaruh terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah. Hal ini sekaligus menguatkan hipotesis yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja daerah.
3. Sumber fiskal daerah ternyata mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi melalui belanja daerah. Besarnya pengaruh ini ditentukan oleh besarnya pengaruh sumber fiskal daerah terhadap belanja daerah dan besarnya pengaruh belanja daerah terhadap kinerja ekonomi.

### **Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disusun saran-saran sebagai berikut:

1. Memperhatikan pengaruh signifikan dari sumber fiskal daerah terhadap belanja daerah, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan dan menggali sumber-sumber fiskal yang dimiliki, sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui belanja daerah.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah merupakan indikator terbesar dalam pembentuk variabel sumber fiskal daerah, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Hal ini juga agar tercapai kemandirian fiskal daerah yang lebih besar. Sehingga tidak membebani dana perimbangan dari pemerintah pusat.
3. Mengingat belanja daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekonomi, maka pemerintah hendaknya dapat menjaga skala prioritas dalam pengalokasian anggaran daerah. Seyogyanya alokasi anggaran untuk sektor publik seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi mempunyai porsi yang lebih besar.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Bapak Dr. Susilo, SE, MS, selaku dosen pembimbing dan Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexiou, Constantinos. 2009. Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe. *Journal of Economic and Social Research* 11(1), Aristotle University, Thessaloniki, Yunani.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Badrudin, Rudy, 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
- Bappenas dan UNDP. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. BRIDGE
- Jogiyanto HM. 2011. *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
- Khusaini, Mokh, Prasetya, Ferry, 2004. *Kinerja Pemerintah Daerah Di Era Desentralisasi Fiskal : Analisis Dampak Anggaran Daerah Terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Malang*, Malang: PPKE Universitas Brawijaya.
- Lin, Justin Yifu dan Liu, Zhiqiang. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, *Economic Development and Culture Change*, 49, 1.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2001. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Nugraeni, 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia, *AKMENIKA UPY*, Volume 8.
- Prasetya, Ferry, 2012. *Modul Ekonomi Publik*, Universitas Brawijaya, tidak dipublikasikan
- Sasana, Hadi, 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No.1.
- Setiyawati, Anis, Hamzah Ardi, 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.4 No.2.
- Sidik, Machfud, 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Seminar setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia.
- Sukadana, I Gede, 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Pengeluaran Daerah di Kabupaten Klungkung*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar. Tidak dipublikasikan
- Todaro, Michael P., Smith Stephen C., 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- , Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- , Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.